

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kaur Membangun Zona Integritas



Sumber Gambar: Google.com

KOTA BINTUHAN – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kaur. Kamis (17/12) BPN Kaur mendeklarasikan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkungan BPN Kabupaten Kaur. Pembangunan zona integritas berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan BPN Kabupaten Kaur.

Dengan terbentuknya zona integritas, maka ke depan BPN akan lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kaur. Untuk mewujudkan semua ini, BPN Kaur tentunya butuh dukungan dari semua pihak. Demi terwujudnya pelayanan yang lebih baik, maju, modern, berstandar dunia, profesional dan terpercaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPN Kaur Bambang Kus Indarto dalam pembukaan pembangunan zona integritas kemarin.

Hadir juga dalam kesempatan itu Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, M.Si, kemudian Kajari Kaur Nurhadi Pupandoyo, SH, MH., Ketua PN Bintuhan Purwanta, SH, MH, Pabung 0408 Bengkulu Selatan Kapten Inf. Henry Marpaung, Kabagren Polres Kaur AKP Lumban Raja dan para tamu undangan lainnya, termasuk juga tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur.

“Zona integritas ini kita bangun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kaur. Dan tahun 2021 yang akan datang banyak program pelayanan kita yang akan kita luncurkan salah satunya pelayanan satu hari selesai dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan, jika tidak maka kita akan tergilas oleh perubahan di era globalisasi. Untuk itu kita sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat Kaur untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun saat ini SDM yang ada masih terbatas namun kita ingin tetap bersemangat melakukan yang terbaik,” jelas Kepala BPN Kaur, Bambang Kus Indarto.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan kalau pembangunan zona integritas meliputi pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian juga pembangunan mental dan spiritual yaitu

pembangunan pola pikir, sikap dan perilaku di jajaran BPN Kaur. Yang semuanya nanti diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang selama ini sangat diharapkan oleh masyarakat.

Terpisah, Sekda Kaur sangat menyambut baik pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh BPN apalagi di zaman modern saat ini. Bahkan pihaknya sangat mendukung, sehingga semua informasi terkait pengurusan tanah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat kedepannya. “Kita tentunya sangat mendukung, dengan adanya zona integritas ini pelayanan BPN Kaur ke depan akan lebih baik lagi dan ini lah yang memang saat ini diharapkan oleh masyarakat,” pungkas Nandar Munadi..

Sumber berita:

1. <https://rakyatbengkulu.com/2020/12/18/bpn-kaur-bangun-zona-integritas/> , 18 Desember 2020
2. <https://bengkuluexpress.com/?s=zona+integritas+BPN+kaur> , 17 Desember 2020

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

- **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- **Tahap-Tahap Pembangunan Zona Integritas** antara lain:
 - Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, yaitu deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

- Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian antara lain:
 - (1) membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
 - (2) memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
 - (3) melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
 - (4) membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - (5) melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
 - (6) membuat strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan
 - (7) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.
- Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), dimana selain pembangunan pada unit kerja, pembangunan Zona Integritas juga dilaksanakan di kawasan terpadu yang bersifat strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK). Aspek penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi fokus Stranas PK karena Reformasi Birokrasi menjadi area strategis dalam pencegahan korupsi. Salah satu kriteria keberhasilan pada aspek ini adalah meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- Penilaian Mandiri oleh TPI, yaitu penilaian yang dilakukan oleh TPI untuk melihat kualitas pembangunan yang telah dilakukan. TPI merupakan Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK atau WBBM.